

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN
LAUT WILAYAH PERBATASAN MELALUI KERJASAMA PERTAHANAN
INDONESIA-JAPAN MARITIME FORUM**

Oleh:

Debora Astuti Sihite

(Deborasihite8@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Ahmad Fuadi, S.IP, M.Si

Bibliografi: 14 Jurnal, 11 Buku, 35 Dokumen Resmi, 8 Tesis dan 44 Website

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28294
Telp/Fax, 0761-63277

ABSTRACT

As the largest archipelago country in the world, Indonesia has a lot of natural resources that make the cross border crime occurred in the border area. The widespread of cross border crime get the marine-based countries realize the importance of increasing the security in the marine border. By the awareness of the widespread of crosss border crime propels Indonesia to have vision as the global maritime fulcrum. With that visions Indonesia tries to increas the security in the border area by doing cooperation with the maritime-based countries. One of such countries is Japan which also an archipelago countries by establishing Indonesia-Japan Maritime Forum.

This research conducted by using neorealism perspective withthe international cooperation theory and maritime security concept, this reseach used qualitative-descriptive method, the data of the research was obtainde by learning related studies, the data used was secunder data derived from memorandum cooperation between Japan and Indonrsia concerning the establishment of maritime forum and other memorandum which established based on the cooperation Indonesia-Japan Maritime.

The result of this research shown the actions which done by the Indonesia government in increasing the security of border area by implementing IJMF cooperation is conducting a strategic dialogue consist of the information exchange establishing working group, building the infrastructure in the border area and implementing the cooperation in eradicating cross border crime such as ilegal fishing and drug trafficking.

Keywords: international cooperation, cross border crime, Indonesia, Japan, Indonesia attempt, maritime forum

Pendahuluan

Kejahatan lintas batas yang marak terjadi di wilayah perbatasan Indonesia sebagai akibat adanya globalisasi yang mendukung kecanggihan teknologi. Sejalan dengan perkembangan dalam studi hubungan internasional, keamanan menjadi prioritas semua negara sebagai akibat dari perang-perang yang telah dialami menjadikan setiap negara selalu waspada dengan kemungkinan perang yang terjadi dikemudian hari¹.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dan posisi kedua di dunia dengan 17.506 pulau dengan luas wilayah lebih dari 7.7 juta km² dan luas wilayah laut 5.8 juta km² serta wilayah Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.6 juta km². Indonesia memiliki 5 ekosistem laut terbesar di dunia mencakup 500 spesies terumbu karang, 2.500 spesies ikan laut, 47 spesies tanaman bakau dan 13 spesies tanaman lamun², Indonesia juga merupakan produsen penghasil ikan terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Peru. Dengan posisi sebagai negara kepulauan terbesar ketiga di dunia menjadikan Indonesia bergantung pada industri pesisir dan kelautan yang menyumbang 25% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 15% tenaga kerja³.

¹ Barry Buzan." Rethinking Security After Cold War". E-Book diakses https://www.jstor.org/stable/45084375?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents (Helsinski,1997) hal 8

² Central Intelligence Agency. "The World Factbook: Indonesia" diakses di <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html> (diakses pada 02 Juli 2020)

³ Databoks, "Jumlah Pulau di Indonesia menurut Provinsi" diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/1>

Posisi Indonesia yang strategis dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah menimbulkan dualisme kondisi bagi Indonesia. Pertama, kondisi strategis Indonesia menguntungkan dengan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Kedua, kondisi strategis Indonesia menimbulkan ancaman bagi kedaulatan Indonesia dimana ancaman militer maupun non-militer kerap terjadi di Indonesia serta menjadi tantangan besar dalam mempertahankannya⁴. Dengan kondisi dualisme yang dihadapi, Indonesia menjadikan keamanan dan pertahanan sebagai prioritas. Ancaman bagi kedaulatan Indonesia kerap terjadi di wilayah perbatasan dimana kejahatan lintas batas seperti penangkapan ikan secara ilegal dan penyelundupan narkoba marak terjadi. Salah satu kejahatan lintas batas terjadi pada 2019 di Batam dengan penangkapan empat orang pria yang diduga melakukan penyelundupan narkoba jenis sabu dari Malaysia seberat 38 kg⁵.

Kejahatan lintas batas yang kerap terjadi di wilayah perbatasan tentunya meresahkan serta merugikan masyarakat, selain masyarakat dan pemerintah yang dirugikan ekosistem bawah laut dapat berakibat degradasi hingga rusaknya ekosistem yang dapat menyebabkan kelangkaan⁶.

0/16/berapa-jumlah-pulau-di-indonesia (diakses pada 13 Januari 2020)

⁴ Soeharto . Buku Peta Potensi Maritim menuju Poros Maritim Dunia (2012) hal 6

⁵ Danu Damarjati, Detik News."Seludupkan Sabu 38 kg di Batam, 4 tersangka terancam hukuman mati" diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4664091/selundupkan-sabu-38-kg-di-batam-4-tersangka-terancam-hukuman-mati> (diakses pada 18 Januari 2020)

⁶ M.Ambari,"Seperti Apa Ancaman Kerusakan Ekosistem Laut Indonesia?" diakses

Indonesia menyadari pentingnya keamanan di wilayah perbatasan menjadikan peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai prioritas sejak pemerintahan presiden Joko Widodo yang menslogankan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, pemerintah Indonesia menjalin berbagai kerjasama berbasis maritim yang bersifat bilateral, multilateral, hingga bersifat regional dibidang maritim, salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia adalah menjalin kerjasama bilateral dengan Jepang dibidang maritim.

Indonesia dan Jepang telah memiliki hubungan kerjasama selama lebih dari 60 tahun sejak tahun 1958 merupakan perjanjian pampasan perang berdasarkan perjanjian San Fransisco hingga kini Indonesia dan Jepang telah menjalin kerjasama di berbagai bidang mulai dari bidang ekonomi, infrastruktur, pertahanan, penanggulangan bencana hingga pinjaman Yen yang kerap diberikan Jepang. Hingga tahun 2015 Indonesia dengan visi sebagai Poros Maritim Dunia mengajukan kerjasama dengan Jepang dibidang maritim untuk pertama kalinya dan pada tahun 2016 kerjasama Indonesia dan Jepang resmi dijalin dengan penandatanganan *Memorandum of Cooperation* di Tokyo.

dari
<https://www.mongabay.co.id/2019/04/12/seperti-apa-ancaman-kerusakan-ekosistem-laut-besar-di-indonesia/> (diakses pada 08 September 2019)

Kerangka Teori

Perspektif penulis dalam penelitian ini menggunakan neorealisme, konsep neorealisme merupakan perpektif non tradisional yang muncul sebagai perluasan dan pendewasaan pada perspektif realisme klasik. Kennet H Walts pada konsep neorealisme-nya memandang bahwa kekuatan negara memiliki komponen yang mengikutinya yaitu : populasi negara, daerah, ekonomi, kapabilitas, kekuatan militer, kestabilan politik, dan kemampuan sebuah negara, Waltz juga mengemukakan konsep dunia sebagai sistem anarki dimana negara merupakan aktor utama dengan satu kesatuan. Perpektif neorealisme memandang semua negara memiliki derajat serta hak dan kewajiban yang sama.

Dengan menganggap desain struktur internasional adalah anarki pemikiran Waltz pada konsep neorealisme mengemukakan tidak adanya otoritas yang mengatur relasi antar negara, dalam kondisi anarki potensi suatu negara untuk menyerang dan diserang oleh negara lain tidak dapat di prediksi⁷.

Pandangan neorealisme memandang keamanan sebagai upaya mempertahankan wilayah kedaulatan serta upaya memproteksi negaras serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

⁷Arash Heydarian Pashakhanlou,E-International Relations Students.”*comparing and contrasting classical realism and neorealism*” dari <https://www.e-ir.info/2009/07/23/comparing-and-contrasting-classical-realism-and-neo-realism/> (diakses pada 13 januari 2020)

Pada prakteknya, negara sebagai unit yang bersifat heterogen senantiasa bertindak serta berperilaku mengejar kepentingan nasional sebagai prioritas, negara akan bekerjasama dilandasi oleh kepentingan domestiknya⁸.

Teori yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah teori kerjasama internasional, kerjasama internasional yang dikemukakan oleh K.J Holsti mendefinisikan pandangan, kepentingan nilai serta tujuan dan menghasilkan sesuatu. Pandangan atau harapan suatu negara dimana kebijakan yang diputuskan oleh negara lain dapat menguntungkan negara tersebut dalam mencapai kepentingan dan nilai-nilainya⁹.

Konsep yang digunakan adalah konsep keamanan laut. Keamanan laut menjadi perhatian setiap negara berbasis maritim untuk mengatasi berbagai ancaman kedaulatan nasional yang berasal dari faktor eksternal, setiap negara memiliki pandangan bahwa konflik laut berawal dari basis kedaulatan suatu negara yang berada di atas daratan, konsep ini mengartikan penanganan keamanan maritim tidak dapat ditangani oleh satu negara saja karena berkaitan dengan perbatasan masing-masing negara yang bersinggungan dan dipisah oleh perairan.

⁸Muhammad zein latuconsina”permasalahan arus keamanan” dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135794-T%2027983-Permasalahan%20arus-Pendahuluan.pdf> (diakses pada tanggal 12 januari 2020)

⁹ K.J. Holsti, *politik internasional* kerangka untuk analisis, jilid II, Terjemahan M Tahrir azhari. (Jakarta: Erlangga, 1998) hlm. 652-653

Keamanan erat kaitanya dengan kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, dimana gangguan terhadap pertahanan negara berkemungkinan terjadi. Bentangan keamanan maritim tergolong ke masalahh keamanan intra-negara dan masalah keamanan lintas nasional, persoalan keamanan negara lain memberikan dampak terhadap stabilitas politik dan sosial dalam negeri. Dalam upaya melindungi warga negara dari ancaman kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan negara membutuhkan kerjasama internasional dengan negara-negara pantai (*coastal state*) dalam penanganannya. Keamanan menurut Barry Buzan merupakan upaya pengelolaan elemen ancaman dengan suatu tujuan terciptanya lingkungan kehidupan pada negara maupun individu yang terbebas dari segala bentuk ancaman¹⁰.

Barry Buzan mengemukakan ancaman dapat dikonstruksi kedalam rangkaian pengakuan (*series of claims*) yang menyatakan suatu pernyataan yang generik terkait dengan perlindungan terhadap suatu objek tertentu¹¹.

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini penulis fokus terhadap upaya yang dilakukn pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan laut wilayah perbatasan dengan kerjasama *Indonesia-Japan Maritime Forum*. Penulis memaparkan beberapa upaya yang

¹⁰Barry Buzan, ole waefer and jaap de wilde: *security”a new framework for analysis-lynne rienner”* (1998). Hal 20

¹¹Ibid, hal 22

dilakukan melalui kerjasama Forum maritim Indonesia dan Jepang

1. Dialog strategis

Sebagaimana tertuang pada *Memorandum of Cooperation* antara Indonesia dan Jepang mengenai kerjasama maritim telah tertuang didalamnya agenda wajib tahunan yang dilaksanakan pejabat pemerintah kedua negara setiap satu tahun sekali pertemuan, sebagai wadah untuk berdiskusi dan bertukar informasi mengenai kerjasama kemaritiman di Indonesia dan Jepang. Pertemuan koordinasi antara pejabat pemerintah Indonesia dan Jepang dilakukan untuk pertama kali di Tokyo pada 13 Desember tahun 2017 dengan membahas kerjasama keamanan serta pelaksanaan kerjasama yang telah ditandatangani¹². Dialog strategis kedua dilaksanakan di Indonesia pada 25 Juni 2018 di Jakarta

2. Kelompok Kerja

Badan keamanan laut Indonesia (BAKAMLA) dan *Japan Coast Guard* (JCG)

Sejak ditandatanganinya kerjasama antara Indonesia dan Jepang pada bidang maritim, bakamla dan JCG telah berupaya melaksanakan kerjasama dilihat

dari kunjungan yang dilakukan *Japan Coast Guard* beserta JICA di Zona Barat Bakamla yang berlokasi di Batam setelah adanya kunjungan yang dilakukan JCG & JICA¹³. Kerjasama dilakukan dengan pelatihan, *work field* yang diadakan kedua lembaga yaitu JCG dan Bakamla yang berlokasi di Indonesia dan Jepang secara bergantian. Kegiatan yang dilakukan antara JCG & Bakamla mencakup bidang *Law enforcement*, *Marine Environment Protection*, *on board exercise* dan *maritime law enforcement*.

¹²PORTAL BUANA. “*Japan Coast Guard makin Pererat Hubungan Kerjasama dengan Bakamla RI*” diakses dari <https://www.portalbuana.com/2018/07/japan-coast-guard-makin-pererat.html> (diakses pada 29 Juli 2020)

¹³ Luska, Nasional News. “JICA dan Japan Coast Guard Kunjungi Kantor Zona Bakamla RI di Batam” dari <https://indonews.id/artikel/9767/JICA-dan-Japan-Coast-Guard-Kunjungi-Kantor-Zona-Bakamla-RI-di-Batam/> (diakses pada 18 Agustus 2020)

Gambar 1. Kunjungan Japan Coast Guard dan JICA ke Zona Maritim Barat Bakamla di Batam¹⁴



Bakamla dan JCG juga membahas kerjasama pendidikan formal *master for maritime security and safety program* (MSSP), JCG juga kerap melakukan kegiatan Ship visit dan *combined exercise* dengan Bakamla¹⁵. Pada Juni 2018 JCG mengadakan pelatihan bersama Bakamla serta *Coast Guard* negara Indo-Pasifik selama satu bulan beragendakan seminar, operasi lapangan dan praktek kolaborasi serta mempelajari teori dasar dan pengetahuan praktis

serta teknik penegakan hukum pada bidang maritim.

Kerjasama dengan JCG juga melibatkan pelatihan pengembangan keterampilan dibidang maritim dan keselamatan laut seperti pelatihan pengendalian kejahatan maritim, hidrografi, dan kapasitas operator *Vessel Traffic Service* (VTS). Pada Juli 2018 Bakamla dan JCG mengadakan pelatihan bersama di Jakarta beragendakan seminar dengan fokus pada *Mobile Corporation Team* (MCT)¹⁶.

3. Pelatihan AL & JMSDF

Walau telah membentuk kelompok kerja pada bidang maritim pemerintah Indonesia dan Jepang juga melaksanakan kerjasam pertahanan pada Angkatan Laut Indonesia dengan *Japan Maritime Self Defense Force* dimana 60% urusan pertahanan Jepang dikelola oleh JMSDF sebagaimana Jepang merupakan negara yang dikelilingi lautan sehingga disebut negara berbasis kelautan¹⁷. JMSDF

¹⁶ Bakamla RI. “*Japan Coast Guard Pererat Hubungan Kerjasama Dengan Bakanla RI*” diakses dari https://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/3617/73972b8c32a6864442288f4fd2285c41 (diakses pada 27 Juli 2020)

¹⁷ USNI News. “*Japan Maritime Self Defense Force Expanding as Tokyo Takes New Approach to Maritime Security*” diakses dari <https://news.usni.org/2019/05/29/japan-maritime-self-defense-force-expanding-as-tokyo-takes-new->

¹⁴ibid

¹⁵PUSPEN TNI “*Perkuat Kerjasama, Bakamla dan Japan Coast Guard Teken MoC*” diakses dari <https://tni.mil.id/view-153538-perkuat-kerjasama-bakamla-dan-japan-coast-guard-teken-moc.html> (diakses pada 27 Juli 2020)

bertanggung jawab akan operasi lapangan seperti pelatihan gabungan serta pertukaran informasi pasukan negara-negara yang bekerjasama dengan Jepang pada bidang kemaritiman.

Pada tahun 2018 *Japan Maritime Self Defense Force* melaksanakan program *Indo-Southeast Asia Deployment 2018* dimana Indonesia menjadi salah satu negara tujuan persinggahan serta melakukan kegiatan bersama angkatan laut Indonesia berupa pelatihan bersama, *visit ship*, dan memperkenalkan persenjataan yang dimiliki oleh JMSDF. Kegiatan ISEAD dilakukan dengan tujuan meningkatkan operasi JMSDF serta mempererat kerjasama dan secara langsung berinteraksi dengan angkatan laut negara mitra Jepang di kawasan Indo-Pasifik. Sebagaimana visi Jepang untuk kawasan Indo-Pasifik bebas dan terbuka maka Jepang perlu mendapatkan kepercayaan dari negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik¹⁸.

approach-to-maritime-security (diakses pada 24 Juli 2020)

¹⁸JMSDF. “*Indo Southeast Asia Deployment 2018 (ISEAD 18)*” diakses dari <https://www.mod.go.jp/msdf/en/operation/operation2018.html> (diakses pada 24 Juli 2020)

4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas di Bidang Maritim

Sebagai upaya mengamankan kawasan *sea lines of communication* (SLOC) Jepang membantu negara-negara yang bersinggungan dengan kawasan SLOC-nya dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan salah satu negara mitra yang dibantu oleh Jepang ialah Indonesia. Jepang yang telah melaksanakan 60 tahun kerjasama dengan Indonesia telah memberikan banyak bantuan dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia, diantaranya pembangunan tol, Jembatan, pelabuhan, kereta cepat (MRT), juga bantuan pembangunan berbasis kemaritiman di wilayah perbatasan seperti pos maritim, pasar pengepul ikan guna memilah ikan-ikan yang dapat di ekspor dan yang dijual di area domestik¹⁹. Jepang juga turut andil dalam pembangunan infrastruktur utama yang berfokus menjaga keselamatan dan keamanan navigasi pada perkapalan dengan pengadaan beberapa peralatan diantaranya:

- Aids to Navigation (AtoN), alat yang berfungsi sebagai perangkat sistem di luar kapal yang dirancang dan dioperasikan untuk

¹⁹ Ministry of Defense of Japan. “*The Basic Plan on Ocean Policy*” diakses dari https://www8.cao.go.jp/ocean/english/plan/pdf/pla n03_e.pdf (diakses pada 25 Juli 2020)

meningkatkan navigasi secara aman dan efisien dari kapal dan mengatur lalu lintas kapal

- Vessel Traffic Management System (VTMS) merupakan sistem manajemen yang mengatur lalu lintas kapal dengan fitur manajemen pelabuhan, perencanaan docking, sistem mengumpulkan pajak pelabuhan, kontrol bea cukai dan manajemen pilotage.

Gambar 2 Vessel Traffic Management System²⁰



- Global Maritime Distress Safety System (GDMSS) merupakan sistem yang digunakan kapal untuk mengirimkan pesan atau transmisi informasi pada alat VTMS saat kapal sedang mengalami kondisi darurat, dapat dilakukan dengan mengirimkan signal lewat alat GDMSS. Penggunaan

GDMSS tergantung pada area laut dimana kapal berlayar dengan skala frekuensi pemakaian adalah medium frekuensi yang berkisar 300 KHz hingga 3 MHz, frekuensi tinggi berkisar 3 MHz hingga 30 MHz, dan frekuensi sangat tinggi berkisar 30 MHz hingga 300 MHz

Tabel 1 Frekuensi GDMSS Bergantung Pada Area²¹

AREA	JARAK	PERALATAN
A1	20-50 M	VHF DSC
A2	50-400 M	VHF+MF
A3	70° N - 70° S	VHF+MF+ One INMARSAT
A4	Diatas 70° N / S	HF+MF+VHF

²⁰ Shelter. "Vessel Traffic Management Information System (VTMS)" diakses dari <https://sheltermar.com.br/en/vts/vtmis/> (diakses pada 28 Juli 2020)

²¹ Shilavadra Bhattacharjee, Marine Navigation."Introduction to Global Maritime Distress Safety System (GDMSS)" diakses dari <https://www.marineinsight.com/marine-navigation/introduction-gmdss-global-maritime-distress-safety-system/> (diakses pada 28 Juli 2020)

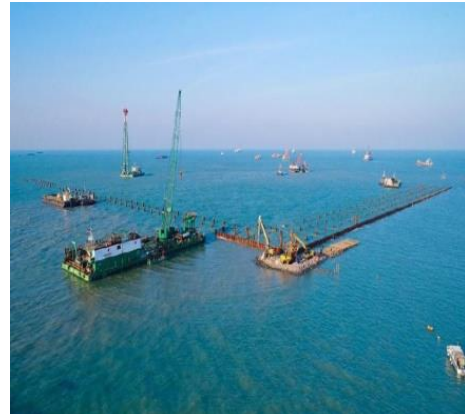
Gambar 3. Global Maritime Distress Safety Sysstem (GDMSS)²²



- Pelabuhan Patimban, Subang
Dalam kerjasama *Indonesia-Japan Maritime Forum* ini Jepang juga turut andil dalam pembangunan pelabuhan Patimban, Subang Jawa Barat sebagai pemberi pinjaman kepada Indonesia dalam bentuk pinjaman yen yang dialokasikan pada pembangunan pelabuhan patimban yang nantinya akan menjadi pusat ekonomi dimana barang yang akan di ekspor maupun diimpor akan berlabuh di pelabuhan tersebut. Dengan kata lain pelabuhan Patimban menjadi pusat ekonomi dalam upaya ekspor-impor yang dilakukan sehingga menambah keuntungan pemerintah dalam kegiatan ekspor-impor.

²² ibid

Gambar 4 Pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat²³



5. Upaya pemberantasan Kejahatan Lintas Batas

Pada pemberantasan kejahatan lintas batas Indonesia dan Jepang melakukan berbagai upaya diantaranya pada kejahatan *illegal fishing* kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Jepang ialah upaya berkesinambungan dari adanya kelompok kerja antara Bakamla dan *Japan Coast Guard* yang melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan serta pengadaan peralatan pada kapal patroli sehingga pada pelaksanaan patroli oleh Bakamla dilakukan metode *Total Allowable Catch* (TAC) dimana adanya penetapan batas tangkapan serta regulasi penghitungan tangkapan ikan.

Jepang memberikan bantuan senilai USD 133,71 juta sejak tahun 2018

²³ KPIP. "Pembangunan Pelabuhan" dari <https://kppip.go.id/proyek-prioritas/pelabuhan/pembangunan-pelabuhan-patimban/> (diakses pada 04 Agustus 2020)

untuk memastikan ketertiban maritim dimana USD 27,8 juta digunakan pada bidang kelautan dan perikanan khususnya pada kegiatan pengawasan seperti kapal patroli, operasi pusat komando, investigasi kejahatan kelautan dan perikanan, surveilans MPA, peningkatan surveilans dengan melibatkan masyarakat dalam memerangi penangkapan ikan yang merusak sumber daya alam²⁴.

Dengan memberlakukan sistem kuota individu dan fokus pada perikanan lepas pantai pemerintah berlakukan untuk kembali meninjau sistem perizinan penangkapan ikan dan upaya mempermudah masuknya kapal nelayan dengan ukuran besar yang fokus pada keselamatan nelayan sehingga teknologi yang ada di kapal-kapal besar dapat digunakan dengan maksimal²⁵.

Setelah pelaksanaan kerjasama *Indonesia-Japan Maritime Forum* hingga tahun 2019 pada triwulan pertama terjadi peningkatan dalam penangkapan kapal ilegal yang dilakukan di wilayah perbatasan dengan jumlah penangkapan sebanyak 38 kapal *illegal fishing* dari bulan Januari hingga April 2019, dengan adanya kerjasama dan dilakukannya patroli pengawasan oleh kelompok kerja Bakamla dan JCG dimana menggunakan kapal patroli yang telah dilengkapi peralatan canggih seperti VMS menjadikan penangkapan serta pengawasan pada kuota penangkapan

²⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “*Maritime Security Commitment*” diakses dari https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/Dokumen%20Komitmen%20OOC%202018/Maritime_Security_commitments_web.pdf (diakses pada 26 Juli 2020)

²⁵ Ibid

perseorangan dapat dilakukan dengan efektif dimana ketentuan penangkapan ikan menjadi lebih efektif²⁶. Dari hasil kerjasama tersebut menjadikan Indonesia sebagai pemasok tuna terbesar di dunia.

Penyelundupan Narkoba

Indonesia dan Jepang dalam pelaksanaan kerjasama pemberantasan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan narkoba. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyelundupan narkoba dalam kerjasama ini ialah dengan mengembangkan keterampilan bakamla sebagai badan yang mengamankan wilayah laut dengan adanya latihan bersama dengan JCG dengan agenda kegiatan *Visit Boarding Search and Seizure* (VBSS) dengan melakukan pengeledahan terhadap kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di wilayah perairan yuridiksi nasional²⁷. Pada kerjasama ini juga kapal patroli dilengkapi dengan pemindai sinar x untuk dapat melacak keberadaan narkoba yang diselundupkan pada kapal-kapal yang berkedok sebagai nelayan di wilayah perbatasan²⁸.

²⁶Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan”Kinerja Pengawasan KKP Sepanjang Triwulan 1/2019 Tunjukkan Capaian Positif” dari <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/10030-kinerja-pengawasan-kkp-sepanjang-triwulan-1-2019-tunjukkan-capaian-positif> (diakses pada 18 Agustus 2020)

²⁷Anggaraman Saragih, Jakarta Greater “*Tim URCL Bakamla siap Latihan Bersama Japan Coast Guard*” diakses dari <https://jakartagreater.com/195302/tim-urcl-bakamla-siap-latihan-bersama-japan-coast-guard/> (diakses pada 27 Juli 2020)

²⁸UNISCI DISCUSSION PAPERS. “*The Threat of Transnational Crime In Southeast*

Kesimpulan

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya meningkatkan keamanan laut wilayah perbatasan dan kerjasama Indonesia-Japan Maritime Forum. Sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan dilapangan yaitu dnegan adanya forum dimana dilakuakn pertukaran informasi serta melakukan pelatihan, seminar, serta melengkapi kapal patroli Indonesia dengan peralatan yang lebih mumpuni yang dimiliki Jepang selain itu Indonesia dan Jepang juga bekerjasama dalam pengadaan dan penyediaan fasilitas infrastruktur yang mendukung upaya dalam mengatasi kejahatan lintas batas seperti penangkapan ikan secara ilegal serta penyelundupan narkoba setelah adanya kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam upaya mengatasi penangkapan ikan secara ilegal pada triwulan 1 tahun 2019 sejak bulan Januari hingga april terdapat peningkatan pada penangkapan kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal sebanyak 38 kapal.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya peningkatan keamanan laut wilayah perbatasan dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara berbasis maritim salah satunya adalah Jepang. Dengan beberapa kegiatan yang diagendakan pada forum maritim tersebut penulis dapat

menyimpulkan bahwa hipotesa yang penulis jabarkan dapat terbukti dengan pembuktian kegiatan yang telah dilakukan forum maritim Indonesia dan Jepang yang telah penulis paparkan pada penjelasan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Direktorat Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri.

“Membangun Kiprah
Maritim Indonesia di Kawasan”
Masyarakat ASEAN, diakses dari
http://setnas-asean.id/site/uploads/document/maga_zine/59913d3c1fbce-edisi-14.pdf edisi 14.2016
(diakses pada 23 Juli 2020).

Furuya, Kentaro.” Maritime Security-The
Architecture of Japan’s
Maritim-Security System in the
East China Sea” . *Naval War
College Review* dari
<https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=8062&context=nwc-review> (diakses pada 17Juli 2020).

Heydarian Pashakhanlou, Arash E-
International Relations
Students.”*comparing and
contrasting classical realism and
neorealism*” dari <https://www.e-ir.info/2009/07/23/comparing-and-contrasting-classical-realism-and-neo-realism/>
(diakses pada 13 januari 2020).

Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy” diakses dari
<https://www.redalyc.org/pdf/767/76711296006.pdf>
f (diakses pada 30 Juli 2020)

Buku:

Buzan, Barry. *Rethinking Security After Coldwar*. Helsinki.1997.

K.J. Holsti, *politik internasional* kerangka untuk analisis, jilid II, Terjemahan M Tahrir azhari. (Jakarta: Erlangga, 1998) hlm. 652-653

Soeharto . Buku Peta Potensi Maritim menuju Poros Maritim Dunia (2012) hal 6.

Laporan:

Bakamla RI. “Japan Coast Guard Pererat Hubungan Kerjasama Dengan Bakanla RI” diakses dari https://bakamla.go.id/home/artikel_le_ngkap/3617/73972b8c32a686444228_8f4fd2285c41 (diakses pada 27 Juli 2020).

Central Intelligence Agency. “The World Factbook: Indonesia” diakses di <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html> (diakses pada 02 Juli 2020).

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan” *Kinerja Pengawasan KKP Sepanjang Triwulan 1/2019 Tunjukkan Capaian Positif*” dari <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/10030-kinerja-pengawasan-kkp-sepanjang-triwulan-1-2019->

tunjukkan-capaian-positif (diakses pada 18 Agustus 2020).

JMSDF. “Indo Southeast Asia Deployment 2018 (ISEAD 18)” diakses dari <https://www.mod.go.jp/msdf/en/operation/operation2018.html> (diakses pada 24 Juli 2020).

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Maritime Security Commitment” diakses dari https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/DATA%20KKP/Dokumen%20Komitmen%20OOC%202018/Maritime_Security_commitments_web.pdf (diakses pada 26 Juli 2020).

KPIP.”Pembangunan Pelabuhan” dari <https://kppip.go.id/proyek-prioritas/pelabuhan/pembangunan-pelabuhan-patimban/> (diakses pada 04 Agustus 2020).

Ministry of Defense of Japan. “The Basic Plan on Ocean Policy” diakses dari https://www8.cao.go.jp/ocean/english/plan/pdf/plan03_e.pdf (diakses pada 25 Juli 2020).

PUSPEN TNI “ *Perkuat Kerjasama, Bakamla dan Japan Coast Guard Teken MoC*” diakses dari <https://tni.mil.id/view-153538-perkuat-kerjasama-bakamla-dan-japan-coast-guard-teken-moc.html> (diakses pada 27 Juli 2020).

UNISCI DISCUSSION PAPERS. “ *The Threat of Transnational Crime In Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy*” diakses dari <https://www.redalyc.org/pdf/767/76711296006.pdf> (diakses pada 30 Juli 2020).

Tesis:

Muhammad zein
latuconsina”permasalahan arus keamanan” dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135794-T%2027983-Permasalahan%20arus-Pendahuluan.pdf> (diakses pada tanggal 12 januari 2020).

Website:

Ambari,M.Mongabay.”Seperti apa ancaman kerusakan ekosistem laut Indonesia?”. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2019/04/12/seperti-apa-ancaman-kerusakan-ekosistem-laut-besar-di-indonesia/.2019>. (diakses 08 september 2019).

DanuDamarjati,Detik News.”Seludupkan Sabu 38 kg di Batam, 4 tersangka terancam hukuman mati” diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4664091/selundupkan-sabu-38-kg-di-batam-4-tersangka-terancam-hukuman-mati> (diakses pada 18 Januari 2020).

Databoks, “ Jumlah Pulau di Indonesia menurut Provinsi” diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/16/berapa-jumlah-pulau-di-indonesia> (diakses pada 13 Januari 2020).

Luska, Nasional News. “ JICA dan Japan Coast Guard Kunjungi Kantor Zona Bakamla RI di Batam” dari <https://indonews.id/artikel/9767/JICA-dan-Japan-Coast-Guard-Kunjungi-Kantor-Zona-Bakamla-RI-di-Batam/> (diakses pada 18 Agustus 2020).

PORTAL BUANA. “ *Japan Coast Guard makin Pererat Hubungan Kerjasama dengan Bakamla RI*”diakses dari <https://www.portalbuana.com/2018/07/japan-coast-guard-makin-pererat.html> (diakses pada 29 Juli 2020).

Saragih, Anggaraman Jakarta Greater
“Tim URCL Bakamla
siap Latihan Bersama Japan
Coast Guard” diakses dari
[https://jakartagreater.com/195302/
tim-urcl-bakamla-siap-latihan-
bersama-japan-coast-guard/](https://jakartagreater.com/195302/tim-urcl-bakamla-siap-latihan-bersama-japan-coast-guard/)
(diakses pada 27 Juli 2020).

Shelter. “Vessel Traffic Management
Information System (VTMS)”
diakses dari
[https://sheltermar.com.br/en/vts/vt
mis/](https://sheltermar.com.br/en/vts/vt
mis/) (diakses pada 28 Juli 2020).

Shilavadra Bhattacharjee, Marine
Navigation.”*Introduction to
Global Maritime Distress Safety
System (GDMSS)*” diakses dari
[https://www.marineinsight.com/m
arine-navigation/introduction-
gmdss-global-maritime-distress-
safety-system/](https://www.marineinsight.com/m
arine-navigation/introduction-
gmdss-global-maritime-distress-
safety-system/) (diakses pada 28
Juli 2020).

USNI News. “*Japan Maritime Self
Defense Force Expanding
as Tokyo Takes New Approach
to Maritime Security*” diakses
dari
[https://news.usni.org/2019/05/29/j
apan-maritime-self-defense-
force-expanding-as-tokyo-
takes-new-approach-to-
maritime-security](https://news.usni.org/2019/05/29/j
apan-maritime-self-defense-
force-expanding-as-tokyo-
takes-new-approach-to-
maritime-security) (diakses pada
24 Juli 2020).